

BAB V – KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Usaha yang melibatkan warga negara asing (WNA) diklasifikasikan sebagai penanaman modal asing menurut hukum Indonesia. Ini mencakup penanaman modal asing penuh maupun kemitraan dengan penanam modal lokal. Secara hukum, warga negara asing tidak bisa memiliki usaha skala UMKM karena hanya dapat memiliki Usaha Besar dan berinvestasi lebih dari Rp 10 miliar dan harus berbentuk PT. PMA. Satu-satunya pengecualian adalah untuk PMA di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dimana Penanaman Modal terbatas tidak berlaku di wilayah KEK.

Implementasi pengaturan terkait usaha asing dan UMKM di Bali menunjukkan walaupun peraturan perundang-undangan sudah mengatur bahwa WNA tidak bisa memiliki usaha skala UMKM, terbukanya bidang-bidang usaha tersebut akan menarik persaingan langsung dengan UMKM lokal dan usaha asing. Terutama jika dalam praktiknya, perusahaan milik perseorangan asing tidak selalu langsung berinvestasi dalam jumlah besar atau menghasilkan pendapatan pada skala Usaha Besar. Sebaliknya, perusahaan-perusahaan ini cenderung memasuki wilayah pendapatan dan investasi skala UMKM selama beberapa tahun pertama operasinya.

Peraturan Perundang-undangan yang paling relevan saat ini dalam mengatur UMKM, investasi asing dalam segala keterkaitannya adalah Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 (“Perpres 10/2021”) mengatur tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, yang diperbarui oleh Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 (“Perpres 49/2021”) sebagai peraturan pelaksana UU Cipta Kerja. Peraturan tersebut mengatur soal bidang usaha yang terbuka, tertutup dan terbuka secara terbatas untuk investasi (Daftar Positif Investasi atau DPI).

Perpres 10/2021 dan Perpres 49/2021 yang menyekat kepemilikan asing dari UMKM dengan amanat perlindungan, di saat bersamaan membuahkan tantangan bagi UMKM dalam semangat untuk membuka pintu untuk investasi asing. Pariwisata, Restoran dan berbagai bidang usaha terbuka untuk kepemilikan asing 100% di Indonesia. Pengaturan investasi asing demikian bersama dengan segala bentuk kelemahan atau kekurangan pengawasan akan merugikan UMKM.

UU Agraria juga merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kepemilikan usaha asing dan UMKM, karena sistem perjanjian *nominee* yang merupakan praktik bermasalah di Bali. Praktik perjanjian ini memberi akses kepada WNA kepada sektor usaha properti.

5.2. Saran

1. Pemerintah baik Pemerintah Pusat (Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kementerian Investasi/BKPM), Pemerintah Daerah dan lembaga pengawas terkait (DPMPTSP) dalam jangka pendek perlu menciptakan peraturan demi menciptakan pengawasan aktif dan tersentralisasi untuk membuat sistem akuntabilitas pengusaha asing yang lebih komprehensif.
2. Pemerintah Pusat perlu mengatur secara teknis bidang usaha yang dapat dimiliki 100% oleh WNA. Setiap daerah memiliki konsentrasi UMKM di sektor-sektor yang berbeda, sektor yang terbuka untuk 100% kepemilikan asing perlu diperketat untuk KEK atau sesuai peruntukkan Kawasan dan pemilik harus memiliki KITAS/KITAP (Kartu Izin Tinggal Tetap). Bidang usaha yang terbuka ini juga dilarang menggunakan Perjanjian *Nominee*. Peraturan ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan

investasi asing disesuaikan dengan karakteristik ekonomi lokal, sehingga tidak merugikan pelaku UMKM yang telah lama beroperasi. Dengan adanya regulasi yang lebih spesifik, pemerintah dapat melindungi UMKM lokal dari persaingan yang tidak seimbang, sambil tetap menarik investasi asing yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing daerah.

3. Pemerintah Pusat dalam jangka panjang perlu mengembangkan perizinan terkait perjanjian sistem *nominee* untuk mencegah penyelundupan hukum seperti yang terjadi di Bali. Dalam jangka pendek, pemangku kepentingan seperti WNI dan WNA yang menggunakan sistem *nominee* dapat diuntungkan adanya lembaga pengawasan dan perizinan seperti DPMPTSP, untuk mencegah praktik bermasalah di daerah Bali khususnya.
4. Strategi untuk mengoptimalkan keberadaan Kepemilikan Asing dan UMKM adalah pendekatan yang lebih bijaksana. Kementerian Koperasi dan UKM, bersama dengan pemerintah daerah, dapat memberikan dukungan berupa peningkatan kapasitas UMKM lokal, memfasilitasi kemitraan antara UMKM lokal dan PT. PMA, serta memberikan insentif untuk segala bentuk investasi asing yang mendukung UMKM.
5. Akademisi perlu melakukan survei dan penelitian dengan fokus usaha milik asing terkait dengan UMKM lokal di semua daerah untuk mengetahui dampak kepemilikan usaha asing terhadap UMKM dalam skala nasional. Fenomena di Bali banyak disorot karena kepadatan turis WNA dan usaha milik asing di wilayah tersebut. Namun penting untuk diingat bahwa keberadaan usaha asing tidak hanya terdapat di Bali; mereka ada di berbagai wilayah lain di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian atau

survei lebih lanjut diperlukan untuk memberi gambaran yang lebih lengkap dampak usaha asing terhadap UMKM di seluruh negeri. Pola-pola dan fenomena yang mungkin ada dalam berbagai konteks regional perlu diidentifikasi untuk mengetahui potensi kebutuhan hukum yang mungkin diperlukan oleh UMKM di daerah-daerah lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

World Bank. *Indonesia Country Gender Assessment: Investing in Opportunities for Women*. 2020.

Jurnal

Al Farisi, Salman, Muhammad Iqbal Fasa, dan Suharto. "Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 9 (2022).

Tambunan, T. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Di Kota Medan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara*, 21(2), 215-227.

Tambunan, Tulus. "Micro, Small and Medium Enterprises in Times of Crisis: Evidence From Indonesia." *Journal of the International Council for Small Business* 2, no. 4 (2021): 278–302. <https://doi.org/10.1080/26437015.2021.1934754>.

Disertasi

Banu, Lukas. Politik Hukum Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengaturan Pengembangan Akomodasi Wisata oleh Perusahaan Penanaman Modal Asing. Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, 2024.

Siaran Pers

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian "Dorong UMKM Naik Kelas dan Go Export, Pemerintah Siapkan Ekosistem Pembiayaan yang Terintegrasi" Siaran Pers, Jakarta, 24 Agustus 2023, diakses 10 Februari 2024

<https://ekon.go.id/publikasi/detail/5318/dorong-umkm-naik-kelas-dan-go-export-pemerintah-siapkan-ekosistem-pembiayaan-yang-terintegrasi#>

Badan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus. "KEK Sanur dan KEK Kura-Kura Bali: Sebuah Transformasi Pariwisata di Provinsi Bali." Siaran Pers, 01 Juni 2023, diakses 8 Agustus 2024.

<https://kek.go.id/id/media/press/KEK-Sanur-dan-KEK-Kura-Kura-Bali-Sebuah-Transformasi-Pariwisata-di-Provinsi-Bali-360>.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal
Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 82 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Atas Pelayanan Golden Visa
Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Internet

Prasetyo, Aji “Melihat Kembali Kemudahan Berusaha UMKM di UU Cipta Kerja”,
hukumonline.com, diakses 24 Maret 2024.

[https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-kembali-kemudahan-berusaha-umkm-
di-uu-cipta-kerja-
lt6035cf5909bc5?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=melihat_kemudahan_berusaha](https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-kembali-kemudahan-berusaha-umkm-di-uu-cipta-kerja-
lt6035cf5909bc5?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=melihat_kemudahan_berusaha)

“Kemudahan untuk UMKM dengan UU Cipta Kerja”, indonesiabaik.id, 2021, diakses 17
Maret 2024.

<https://indonesiabaik.id/infografis/kemudahan-untuk-umkm-dengan-uu-cipta-kerja>

Johanes Galuh Bimantara, Fajar Ramadhan, Dhanang David Aritonang, Harry Susilo,
“Investasi Asing Jangan Rugikan Warga Lokal” kompas.id, 26 Mei 2023, diakses 17
Maret 2024,

[www.kompas.id/baca/investigasi/2023/05/25/investasi-asing-jangan-rugikan-warga-
lokal?status=sukses_login%3Fstatus_login%3Dlogin&status_login=login](http://www.kompas.id/baca/investigasi/2023/05/25/investasi-asing-jangan-rugikan-warga-
lokal?status=sukses_login%3Fstatus_login%3Dlogin&status_login=login)

Johanes Galuh Bimantara, Fajar Ramadhan, Dhanang David Aritonang, Cokorda Yudistira M
Putra, Harry Susilo, “Minim Tindak Lanjut Aduan WNA Pelanggar Aturan”. *kompas.id*,
24 Mei 2023, diakses 11 Agustus 2024.

[https://www.kompas.id/baca/investigasi/2023/05/24/minim-tindak-lanjut-aduan-wna-pelanggar-aturan.](https://www.kompas.id/baca/investigasi/2023/05/24/minim-tindak-lanjut-aduan-wna-pelanggar-aturan)

Bali Post. "Disinyalir, Banyak WNA Geluti UMKM di Bali secara Ilegal." 26 Juni 2024.

Diakses 8 Agustus 2024.

[https://www.balipost.com/news/2024/06/26/406156/Disinyalir,Banyak-WNA-Geluti-UMKM...html#google_vignette.](https://www.balipost.com/news/2024/06/26/406156/Disinyalir,Banyak-WNA-Geluti-UMKM...html#google_vignette)

Johanes Galuh Bimantara, Fajar Ramadhan, Dhanang David Aritonang, Cokorda Yudistira M Putra, Harry Susilo, "WNA Leluasa Bekerja secara Ilegal di Bali" kompas.id, 25 Mei 2023, diakses 17 Maret 2024.

www.kompas.id/baca/investigasi/2023/05/24/wna-leluasa-bekerja-secara-ilegal-di-bali

Ginta, Yohanes Valdi Seriang. "Polisi Sebut Banyak WNA Pinjam Nama Warga Lokal untuk Bangun Vila Ilegal di Bali" Kompas.com, 31 Mei 2023, diakses 19 April 2024

<https://denpasar.kompas.com/read/2023/05/31/190440278/polisi-sebut-banyak-wna-pinjam-nama-warga-lokal-untuk-bangun-vila-ilegal-di?page=all>

"Pakar: UMKM Penyelamat Resesi Ekonomi Asal Dapat Pembiayaan Murah" Republika.co.id, 26 Januari 2023, diakses 25 Maret 2024

ekonomi.republika.co.id/berita/rp3nut502/pakar-umkm-penyelamat-resesi-ekonomi-asal-dapat-pembiayaan-murah

"Indonesia Gender Equality Program" worldbank.org, diakses 25 Maret 2024

<https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/brief/gender-equality-for-growth-research-and-analytical-program-in-indonesia#1>

“OJK Siapkan Peraturan Baru tentang Kepemilikan Asing dan Persyaratan Modal Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi”, hukumonline.com, 17 Februari 2023, diakses 21 Desember 2023 <https://pro.hukumonline.com/a/lt63ef08efd0611/ojk-siapkan-peraturan-baru-tentang-kepemilikan-asing-dan-persyaratan-modal-perusahaan-pialang-asuransi--perusahaan-pialang-reasuransi--dan-perusahaan-penilai-kerugian-asuransi>

Medina, Ayman Falak “Indonesia’s Positive Investment List: Sectors Open and Restricted to Foreign Businesses”, ASEAN Briefing, 25 April 2023, diakses 25 Maret 2024 <https://www.aseanbriefing.com/news/indonesias-positive-investment-list-and-the-sectors-open-restricted-to-foreign-businesses/>

Rizki, Mochamad Januar. “Proteksionsime Berlebihan Produk Asing Berisiko Lukai UMKM” Hukumonline.com, 7 Mei 2021, diakses 19 April 2024 <https://www.hukumonline.com/berita/a/proteksionsime-berlebihan-produk-asing-berisiko-lukai-umkm-lt60950ce66dd37/>

Samudero, Rizky Setyo. "Investasi Asing Dominasi Duit yang Parkir di Bali, Rp 2,66 Triliun per Kuartal I" detik.com, 14 Juli 2023, diakses 19 April 2024 <https://www.detik.com/bali/bisnis/d-6822998/investasi-asing-dominasi-duit-yang-parkir-di-bali-rp-2-66-triliun-per-kuartal-i>.

Dampak Bisnis WNA, Rezeki Warga Lokal Bali Turut Memudar." Labirin News. Diakses August 3, 2024. <https://v1.labirin.id/news/30780/dampak-bisnis-wna-rezeki-warga-lokal-bali-turut-memudar>.